



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018



LAPORAN PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi
Tahun 2018

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya penyusunan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Tahun 2018. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan RB di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Laporan ini memuat perkembangan dan pencapaian pelaksanaan RB terkait 8 (delapan) area perubahan, yakni manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Laporan ini sebagai dokumen pertanggungjawaban, penyusunannya memberikan gambaran secara komprehensif pelaksanaan RB, seperti capaian program dan kegiatan RB di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sepanjang tahun 2018. Akhir kata, kiranya kami berharap laporan ini dapat memenuhi harapan setiap pemangku kepentingan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, Desember 2018

Sekretaris Jenderal,



M. Guntur Hamzah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
1 PENDAHULUAN.....	1
2. PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DI TAHUN 2018	2
· Manajemen Perubahan.....	2
· Penataan Peraturan Perundang-Undangan.....	7
· Penataan dan Penguatan Organisasi.....	9
· Penataan Tata Laksana	11
· Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	14
· Penguatan Pengawasan.....	19
· Penguatan Akuntabilitas Kinerja	21
· Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	23
3. PENUTUP	26

PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2018

1 PENDAHULUAN

Program Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang dibuat untuk mendukung Birokrasi yang bersih dan bebas KKN, serta mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik. Program Reformasi pertama kali dikenalkan ke publik melalui Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010- 2014 yang menetapkan 11 prioritas nasional dengan prioritas nasional yang pertama adalah reformasi birokrasi dan tata kelola.

Untuk mendukung pelaksanaan program Reformasi Birokrasi yang berkesinambungan, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sebagai rancangan induk yang berisikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga membagi program Reformasi Birokrasi ke dalam 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Manajemen Perubahan.
2. Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Penataan Dan Penguatan Organisasi.
4. Penataan Tata Laksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
6. Penguatan Pengawasan.
7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Instansi Pemerintah yang lahir pada era reformasi di tahun 2003 telah berkomitmen untuk

memberikan dukungan kepada Hakim Konstitusi dan memberikan akses peradilan yang mudah kepada Masyarakat. Adanya kesamaan tujuan antara program Reformasi Birokrasi yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan tujuan organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi membuat implementasi program Reformasi Birokrasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Memasuki akhir periode II (2015-2019) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Kepaniteraan dan saat ini masih terus berkomitmen dan berupaya untuk tetap meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada para stakeholders melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi. Berbagai upaya yang dilakukan dengan meningkatkan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam memberikan dukungan terhadap kinerja Hakim Konstitusi dan juga meningkatkan akses peradilan kepada masyarakat luas.

2. PENCAPAIAN REFORMASI BIROKRASI KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DI TAHUN 2018

MANAJEMEN PERUBAHAN

Manajemen Perubahan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang menitikberatkan pada perubahan Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (cultural set) Birokrasi. Memasuki pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahap Kedua (2015-2019), tema besar dari Manajemen Perubahan adalah revolusi mental ASN sesuai dengan agenda Nawacita Presiden Jokowi. Definisi dari revolusi mental ASN adalah mengubah pola pikir Birokrasi dilayani menjadi melayani dan mewujudkan Birokrasi yang bersih dan bebas dari Korupsi.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area Manajemen Perubahan pada tahun 2018 antara lain :

Tunas Integritas

Survei *Ease of Doing Business* yang dilakukan oleh World Bank pada tahun 2018 menunjukkan bahwa praktik korupsi masih sering terjadi di dalam

Birokrasi Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di dalam Birokrasi Indonesia, namun secara umum terdapat 3 faktor utama yang mendorong korupsi di Birokrasi Indonesia yaitu Lemahnya sistem pengawasan, lemahnya kultur antikorupsi, dan rendahnya Integritas sumber daya manusia (Prasojo 2012; TI 2012; Wahyudi N.D.).

Guna mengatasi permasalahan korupsi di dalam tubuh Birokrasi, Pemerintah telah membuat berbagai macam program yang bertujuan mencegah terjadi praktik korupsi. Salah satu program pemerintah yang sedang digaungkan oleh pemerintah dalam memberantas korupsi di dalam birokrasi adalah program yang bernama Tunas Integritas. Program Tunas Integritas adalah program yang dirancang KPK bermuatan materi untuk membangun integritas Individu dalam organisasi dan menciptakan budaya antikorupsi dalam organisasi.



Kegiatan Workshop Tunas Integritas Tahun 2018

Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah mengadakan kegiatan Workshop Pembangunan Tunas Integritas Tahun 2018 dengan peserta sebanyak 193 Orang. Kegiatan Workshop

Pembangunan Tunas Integritas ini merupakan kegiatan lanjutan dari kegiatan pengembangan Tunas Integritas Tahap I Tahun 2016 dan Tahap II di tahun 2017. Tujuan dilakukannya kegiatan Tunas Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat membentuk Tunas Integritas bagi seluruh ASN yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Festival Anti Korupsi

Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ketiga kalinya mengadakan Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di Universitas Sumatera Utara pada tanggal 14-15 Mei 2018. Festival ini digelar dalam rangka untuk memperkuat konstitusi dan memperkuat dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Pada festival ini, digelar kegiatan diskusi panel dan talk show yang berisi materi tentang konstitusi dan korupsi. Selain itu, Festival ini juga diisi dengan stand informasi lembaga dari MK, MPR dan KPK. Tujuan dari festival ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kepada Masyarakat tentang bahaya Korupsi terhadap penegakan Konstitusi.



Kegiatan Diskusi Panel dalam Acara Festival Konstitusi dan Antikorupsi Tahun 2018

Pelatihan Motivasi

Kinerja individu dalam Organisasi mempunyai hubungan yang erat dengan tujuan dari Organisasi. Apabila kinerja individu menurun maka dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi Organisasi. Untuk menjaga kinerja individu agar tetap baik maka organisasi perlu menjaga motivasi individu. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga agar pegawai tetap berkinerja secara positif adalah dengan melakukan pelatihan motivasi.

Saat ini, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal secara rutin telah melakukan pelatihan motivasi setiap tahunnya dalam rangka menjaga memperkuat integritas dan meningkatkan kinerja individu. Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mengadakan pelatihan motivasi bertempat di Lido. Narasumber dari kegiatan tersebut adalah Ir. Lies Hartono atau lebih dikenal sebagai Cak Lontong. Dalam acara pelatihan motivasi, pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi baik ASN maupun PPNPN menerima materi dari Cak Lontong tentang pentingnya bekerja sama dan keterbukaan komunikasi. Selain itu, kegiatan pelatihan motivasi diisi dengan acara outbound yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama, komunikasi, dan kemampuan mengasah pola pikir.



Ir. Lies Hartono atau sering dikenal dengan Cak Lontong sedang memberikan materi dalam kegiatan Diklat motivasi

Internalisasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi

Hasil Survei Internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan 90% (Sembilan puluh persen) pegawai ASN dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah mengetahui tentang program Reformasi Birokrasi dan hanya 10% (Sepuluh Persen) responden pegawai ASN yang belum mengetahui dengan baik tentang program Reformasi Birokrasi. Sementara itu, menurut Catatan Tim Evaluasi Kementerian PAN & RB, masih terdapat beberapa pegawai ASN yang belum memahami dengan baik tentang Reformasi Birokrasi. Berangkat dari kedua fakta tersebut, guna meningkatkan pemahaman ASN yang bekerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Reformasi Birokrasi, maka diadakan kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi di setiap unit kerja yang dipimpin oleh Kepala Biro dan Kepala Pusat.



Kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Reformasi Birokrasi Biro Humas dan Protokol

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Area penataan peraturan perundang-undangan merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang difokuskan untuk mencapai peraturan yang harmonis dan sinkron sehingga dalam pelaksanaan peraturan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan peraturan perundang-undangan pada tahun 2018 antara lain :

Revisi terhadap Kerangka Regulasi

Dalam pelaksanaan kewenangannya, MK memerlukan kerangka regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, berupa Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi. Seluruh ketentuan tersebut merupakan dasar dan pedoman bagi MK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan dan mengikuti dinamika hukum yang berkembang di masyarakat, MK melakukan penyempurnaan atas PMK yang telah ada maupun menetapkan PMK baru guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, maka dilakukanlah revisi terhadap Kerangka Regulasi sebagaimana termuat dalam Revisi I Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2015-2019 pada bulan Desember 2017. Pada revisi Renstra I ini, telah dilakukan penambahan rencana, yakni perubahan PMK terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi.

Dengan mengingat bahwa pelaksanaan PMK tentang Pedoman Beracara pada masing-masing kewenangan MK diatur dalam pedoman teknis, dan pedoman teknis tersebut diwadahkan dalam Peraturan Ketua MK, maka

perubahan terhadap PMK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Perubahan dilakukan terutama pada Pasal 3, yang menyatakan hanya ada 4 (empat) produk hukum MK, yaitu (a) Putusan, (b) Ketetapan MK, (c) Peraturan MK, dan (d) Keputusan Ketua MK. Dalam Pasal tersebut, produk hukum berupa Peraturan Ketua MK belum diakomodasi, sehingga perlu dimasukkan.

Sosialisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi

Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan Satu Pasangan Calon, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) telah disosialisasikan kepada *stakeholder*. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan ini perlu dipahami oleh para pihak (Pasangan Calon, Pengacara/Advokat, KPU dan Bawaslu) mengingat penyelesaian perkara pilkada memiliki limitasi waktu penyelesaian, yakni harus diputus dalam 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Apabila ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini tidak dapat dipahami oleh para pihak, dikhawatirkan persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*) tersebut bisa terhambat.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan sosialisasi terkait PMK Nomor 5 Tahun 2017, PMK Nomor 6 Tahun 2017, PMK Nomor 7 Tahun 2017 dan PMK Nomor 8 Tahun 2017 dalam bentuk Bimbingan Teknis yang telah diselenggarakan sebanyak 12 (dua belas) kali bagi pihak eksternal (Pasangan Calon Kepala Daerah, KPU, Bawaslu, Advokat)



Kegiatan BIMTEK Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota Secara Serentak Tahun 2018

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

Penataan dan penguatan organisasi merupakan area perubahan Reformasi Birokrasi yang di fokuskan untuk menata bisnis proses organisasi dan kelembagaan dan menyusun organisasi secara tepat fungsi dan tepat ukuran

Penyusunan dan Penyempurnaan Analisa Jabatan

Pada Tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan reorganisasi dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja Hakim Konstitusi dan menjawab kebutuhan organisasi. Dasar dari perubahan organisasi adalah dengan telah diterbitkannya Perpres 65/2017 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 49/2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adanya perubahan organisasi, telah mengakibatkan perubahan dan fungsi peran setiap Jabatan yang ada dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari hal tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan penyusunan dan penyempurnaan Analisa Jabatan agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan fungsi antar Jabatan yang berada di dalam struktur organisasi terbaru.



Kegiatan penyusunan ANJAB untuk Jabatan Eselon II

Penyusunan Analisis Beban Kerja

Adanya perubahan organisasi tidak hanya berpengaruh pada perubahan tugas dan fungsi setiap jabatan, tetapi juga berpengaruh terhadap *manpower planning* di setiap unit organisasi. Untuk memastikan setiap unit kerja tidak mengalami masalah *overload* atau *underload* dalam melakukan tugas dan fungsi, maka Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di tahun 2018 melakukan kegiatan penyusunan Analisis Beban Kerja dengan menyesuaikan struktur organisasi yang baru.



Kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja di Biro Perencanaan dan Keuangan

PENATAAN TATA LAKSANA

Area Penataan tata laksana adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada penataan prosedur operasional standar di dalam *core business* instansi dan penggunaan TIK dalam memberikan pelayanan publik.

Kegiatan yang dilakukan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi di area penataan tata laksana pada tahun 2018 antara lain :

Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis

Kegiatan Reorganisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 telah berimplikasi pada perubahan kegiatan proses bisnis yang telah berjalan. Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara peta proses bisnis dengan Struktur Organisasi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pada tanggal 26-27 September 2018 mengadakan kegiatan bimbingan teknis penyempurnaan peta proses bisnis dan standar operasional prosedur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural yang berada di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hasil dari kegiatan bimbingan teknis tersebut, dilanjutkan dengan penyusunan peta proses bisnis di masing-masing unit kerja.



Bimtek Penyempurnaan Peta Proses Bisnis Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI dengan Narasumber dari Kementerian PAN dan RB

Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur

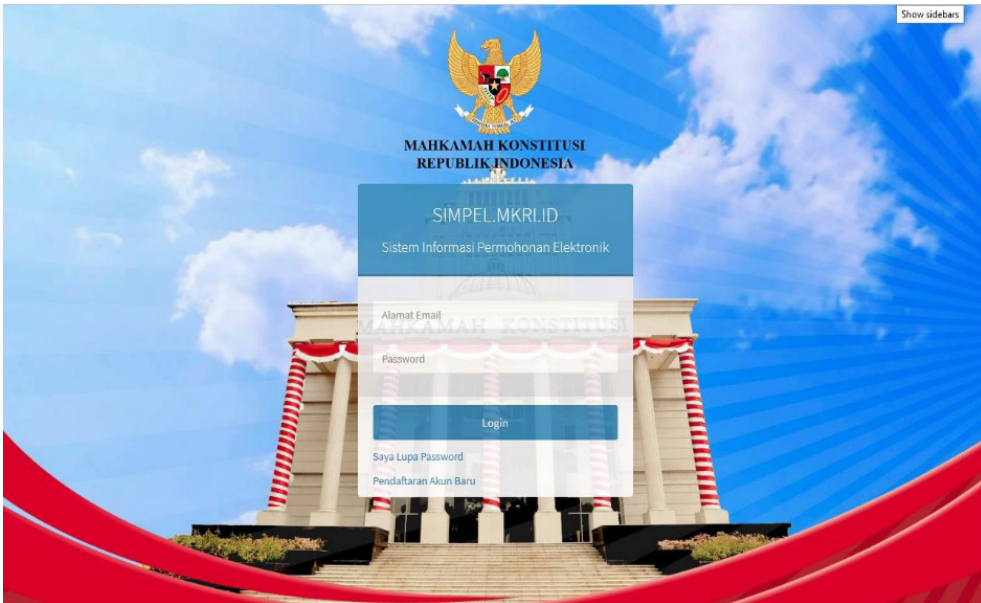
Selain melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Peta Proses Bisnis, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi juga melakukan Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur akibat adanya reorganisasi. Pada semester pertama di tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap SOP. Hasil dari kegiatan inventarisasi, akan ditindaklanjuti dengan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan SOP di masing-masing unit kerja yang akan dilakukan pada tahun 2019.

DAFTAR IDENTIFIKASI SOP BIRO UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI						
No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Output	SOP Yang Dibutuhkan	Jumlah SOP	Keterangan
Bagian Pengadaan dan Penatausahaan BMN						
Subbagian Layanan Pengadaan						
1		Pengadaan Barang/Jasa ≤ Rp.10.000.000,-	Bukti Pembelian	SOP Usulan Pengadaan Barang/Jasa ≤ 10 juta	1	
2		Pengadaan Barang/Jasa > Rp.10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	Kuitansi	SOP Usulan Pengadaan Barang/Jasa Rp.10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-	1	
3		Pengadaan Barang/Jasa > Rp.50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	Surat Perintah Kerja (SPK)	SOP Usulan Pengadaan Barang/Jasa > Rp.50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-	1	
4		Pengadaan Barang/Jasa > Rp. 200.000.000,-	Kontrak	SOP Usulan Pengadaan Barang/Jasa > Rp. 200.000.000,-	1	
5		Pengadaan Jasa Konsultasi ≤ Rp. 100.000.000,-	Kuitansi	SOP Usulan Pengadaan Jasa Konsultasi ≤ Rp. 100.000.000,-	1	
6		Pengadaan Jasa Konsultasi > Rp. 100.000.000,-	Surat Perintah Kerja (SPK)	SOP Usulan Pengadaan Jasa Konsultasi > Rp. 100.000.000,-	1	
Subbagian Penatausahaan BMN						
1		Input Data BMN ke Aplikasi Tracking Asset	Laporan Daftar BMN per semester	SOP Pelaksanaan Input Data BMN ke Aplikasi Tracking Asset	1	
2		Pendistribusian BMN	Laporan Pendistribusian BMN	SOP Pelaksanaan Pendistribusian BMN	1	
3		Berita Acara Serah Terima Penyerahan dan Pengembalian, Penarikan BMN	Laporan Berita Acara Serah Terima Penyerahan BMN Laporan Berita Acara Serah Terima Pengembalian BMN Laporan Berita Acara Serah Terima Penarikan BMN	SOP Pembuatan Berita Acara Serah Terima Penyerahan dan Pengembalian, Penarikan BMN	1	
4		Peminjaman BMN	Laporan Peminjaman BMN Per Bulan	SOP Pelaksanaan Peminjaman BMN	1	
5		Perencanaan Pemeliharaan BMN	Laporan Perencanaan Pemeliharaan BMN	SOP Pelaksanaan Perencanaan Pemeliharaan BMN	1	
6		Pelaksanaan Pemeliharaan BMN	Jumlah BMN yang sudah dilakukan pemeliharaan	SOP Pelaksanaan Pemeliharaan BMN	1	

Daftar Identifikasi SOP Biro Umum

SIMPEL (Sistem Informasi Permohonan Online)

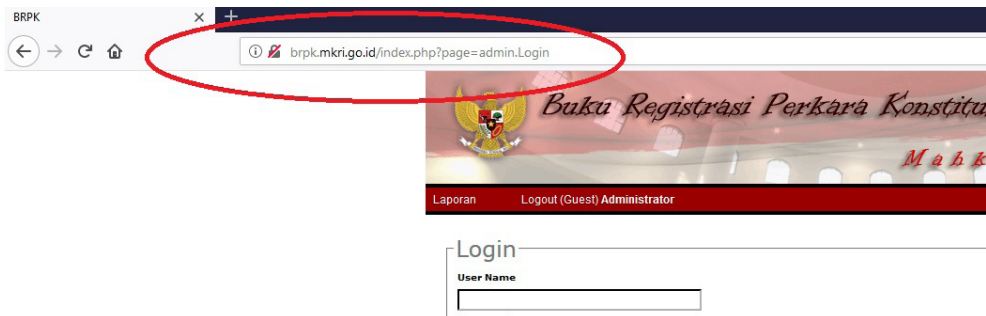
Dalam rangka mewujudkan administrasi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya sesuai dengan visi Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi membuat layanan Pengajuan Permohonan Elektronik (*Electronic Filing*) untuk masyarakat yang akan berperkara di Mahkamah Konstitusi. Nama dari layanan tersebut adalah SIMPEL. Dengan menggunakan SIMPEL, permohonan dapat disampaikan secara *online* dan *real-time* (seketika) sehingga pemohon yang berada di lokasi yang jauh dari Mahkamah Konstitusi tidak perlu repot memikirkan biaya transportasi.



Tampilan halaman muka SIMPEL MKRI.ID

E-BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik)

BRPK pada awalnya adalah buku dalam bentuk yang mencatat setiap kegiatan perkara dari tahapan registrasi sampai putusan. Seiring dengan berjalannya waktu, cara kerja ini tidak efisien dan efektif karena telah menghabiskan waktu dan tenaga lebih banyak. Guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan persidangan, maka dibuat Aplikasi e-BRPK yang dapat memangkas penggunaan waktu dan tenaga serta menjamin keamanan informasi perkara. Kehadiran E-BRPK membuat kegiatan catatan perkara yang masuk menjadi lebih mudah dan cepat untuk dicatat, dicari dan ditindaklanjuti.



Tampilan halaman muka E-BRPK

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

Area penataan sistem SDM aparatur adalah area Reformasi Birokrasi yang difokuskan dalam penataan SDM dengan tujuan menciptakan profesionalisme dalam manajemen SDM dari mulai penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, rekrutmen , pengembangan karier dan promosi aparatur berbasis kompetensi ,kesejahteraan pegawai, hingga pemberhentian/pensiun pegawai.

Pelatihan Bahasa Inggris

Di era globalisasi saat ini, Kemampuan berbahasa Inggris merupakan faktor penting untuk membuka komunikasi di dalam pergaulan Internasional. Selain itu, dalam rangka menuju *World Class Bureaucracy*, setiap ASN di Indonesia harus mempunyai kemampuan Bahasa Inggris yang baik agar dapat memberikan pelayanan optimal kepada para *stakeholders*. Guna meningkatkan eksistensi Mahkamah Konstitusi di dalam pergaulan internasional dan mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 mengadakan pelatihan Bahasa Inggris bagi seluruh ASN dan para Hakim Konstitusi. Pelatihan Bahasa Inggris ini dilakukan bekerja sama dengan Lembaga British Council dan LIA.



Kegiatan Pelatihan Bahasa Inggris

Pengisian Jabatan dengan Seleksi terbuka

Salah satu amanat Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan merit sistem di dalam Birokrasi Indonesia. Adanya proses rekrutmen dan seleksi yang dilakukan secara terbuka dan akuntabel merupakan salah satu cara pemenuhan untuk mencapai merit sistem. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai instansi pemerintah yang lahir pada era Reformasi senantiasa mendukung implementasi merit sistem di dalam Birokrasi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam pengisian jabatan struktural telah menggunakan sistem rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Dalam proses seleksi dan rekrutmen, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi berkoordinasi dengan KASN, Kalangan Akademis, dan Lembaga konsultan SDM yang menyelenggarakan *Assessment Center*. Kerja sama yang dilakukan dengan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat hasil yang berkualitas, akuntabel, dan transparan.



Kegiatan Tes tertulis (Pembuatan makalah) dalam tahap seleksi jabatan Eselon IV

Kegiatan Recharging dan Internship

Di era pasca reformasi saat ini, Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang tertinggi dituntut untuk selalu dapat memberikan putusan yang berkualitas. Guna mewujudkan hal tersebut, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai *supporting* unit yang membantu kinerja para Hakim Konstitusi telah menciptakan program



Salah satu Kegiatan Internship yaitu menerima materi tentang pengembangan Organisasi

Recharging dan *Internship* yang ditujukan kepada ASN yang berada dilingkungan *Kepaniteraan* dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang dimulai sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan *The Hague University*. Tujuan dari Kegiatan *Recharging* adalah pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk *supporting* unit yang berada di administrasi peradilan, sedangkan kegiatan *Internship* ditujukan kepada *supporting* unit yang berada di administrasi umum. Materi yang diajarkan dalam kegiatan *Recharging* adalah materi yang berkaitan hukum di Eropa seperti :



Salah satu Kegiatan Recharging yaitu memberikan Presentasi tentang pelaksanaan HAM di Indonesia

Electoral Dispute: General Elections, Presidential Elections, Regional Elections, Judicial Ethics and National Elections, Law and Political Discourse in National Elections dan berbagai macam materi lainnya tentang hukum. Sementara itu materi Internship lebih dikhususkan kepada materi : Human Resources Development, dan Controlling System.

Dengan adanya program *Recharging* dan *Internship* diharapkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat memberikan dukungan yang optimal kepada Hakim Konstitusi.

Diklat Kepaniteraan

Dalam rangka menghadapi dan mempersiapkan penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2019, MK menggelar Pendidikan dan Pelatihan Kepaniteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang diikuti 114 orang pegawai terdiri dari Panitera Pengganti, Peneliti dan Pegawai yg berlatar belakang sarjana hukum.



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka Diklat Kepaniteraan Bagi Pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Kegiatan Diklat Kepaniteraan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 13 – 15 Desember 2018 dan bertempat di Hotel Haris, Bekasi. Narasumber Diklat Kepaniteraan adalah Yang Mulia Hakim Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Panitera Mahkamah Konstitusi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum.

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi

Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 diikuti 160 karyawan mancadaya di lingkungan MK. Kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari, yaitu Kamis – Jumat, tanggal 13-14 Desember 2018, dan digelar di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor. Salah satu kewenangan MK adalah menangani perkara perselisihan perkara pemilihan umum. Untuk menghadapi perhelatan demokrasi Indonesia yang akan digelar April 2019 mendatang, MK perlu melibatkan kontribusi seluruh pegawai dan karyawan mancadaya demi kelancaran MK dalam menghadapi penanganan perkara PHPU 2019. Sehingga, semua pihak siap menghadapi ketika adanya permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum dalam rentang waktu April - Juni 2019 mendatang.



Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK Mulyono membuka Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi dan Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

Pemberian Penghargaan Pegawai Teladan

Dalam rangka memberikan penghargaan dan dorongan motivasi terhadap pegawai. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, setiap tahunnya, memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN dan PPNPN. Pemberian penghargaan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan apresiasi kepada pegawai yang berprestasi dan diharapkan dapat mendorong motivasi kepada para pegawai yang bekerja dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Pemberian Penghargaan Pegawai teladan di acara HUT Mahkamah Konstitusi

PENGUATAN PENGAWASAN

Area penguatan pengawasan adalah area Reformasi Birokrasi yang fokus pada upaya-upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif yang taat pada peraturan dengan menjalankan pengelolaan keuangan transparan dan akuntabel.

Pada tahun 2017, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah mendirikan unit kerja Inspektorat sebagai upaya untuk memperkuat peran pengawasan internal. Dalam rangka penguatan peran Inspektorat, pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi telah melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 21-23 September 2018 di Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh Auditor dan Auditee. Materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis adalah tentang manajemen pengawasan. Tujuan dari kegiatan ini adalah kualitas kompetensi auditor tentang manajemen pengawasan meningkat, terciptanya kesamaan persepsi antara Auditor dengan Auditee tentang pengawasan dan Naiknya level kapabilitas APIP Mahkamah Konstitusi



Kegiatan Bimtek Manajemen Pengawasan Kegiatan Bimtek Manajemen Risiko dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Bimbingan Teknis Penilaian Risiko

Manajemen Risiko merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan identifikasi terhadap risiko setiap kegiatan organisasi dan melakukan pengendalian terhadap potensi risiko. Kegiatan manajemen risiko perlu dilakukan agar organisasi dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kegiatan Manajemen Risiko dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dipimpin oleh unit organisasi Inspektorat. Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan *Bimbingan Teknis Penilaian Risiko* yang diikuti seluruh unit organisasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu setiap unit organisasi yang ada dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk mengidentifikasi dan meminimalisir setiap risiko yang sudah diidentifikasi.



Kegiatan Bimtek Manajemen Risiko dilingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Penguatan akuntabilitas kinerja adalah area perubahan yang fokus pada penataan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai 2 pencapaian di area Penguatan Akuntabilitas Kinerja yaitu antara lain:

Mendapat Penghargaan WTP

Kepaniteraan dan sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006 hingga tahun 2017 telah mendapatkan predikat WTP secara berturut-turut sebanyak 12 (dua belas) kali. penghargaan ini menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Mahkamah Konstitusi telah dipandang terkelola secara tertib, taat aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab kepada para stakeholders.



Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK

Mendapat Kontribusi Kewajiban Perpajakan Tahun 2018

Pada tahun 2018, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mendapatkan piagam penghargaan dari KPP Pratama Jakarta Gambir Satu. Pemberian Piagam ini diberikan sebagai apresiasi terhadap kinerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai wajib pajak yang patuh dan taat aturan.



Piagam Penghargaan Kontribusi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

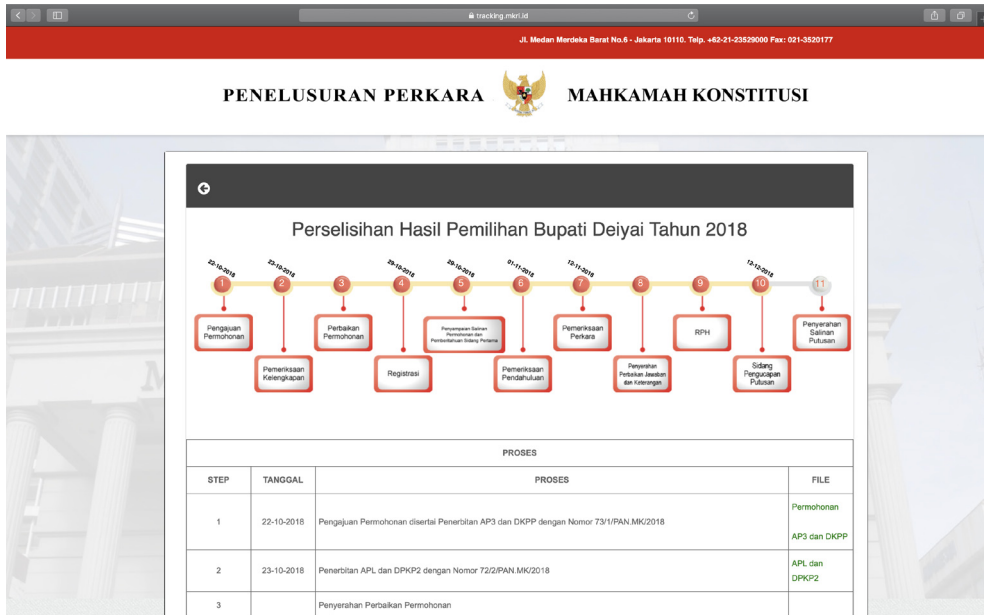
Area peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan area Reformasi Birokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari KKN untuk Masyarakat.

Untuk menciptakan pelayanan publik Mahkamah Konstitusi sejak berdiri tahun 2003, terus mengembangkan berbagai macam layanan kepada publik. Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi mengembangkan layanan sebagai berikut:

Case Tracking

Case Tracking merupakan sebuah sistem informasi yang dapat bebas diakses oleh publik untuk kepentingan langsung dalam perkara, akademis, media, pengawasan publik, dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan

semua perkara yang telah atau sedang dalam proses persidangan. Publik dapat mengakses case tracking di alamat <https://tracking.mkri.id/>. Informasi yang dapat diperoleh publik dalam menggunakan case tracking antara lain waktu dan tahapan persidangan dan berkas-berkas yang diajukan dalam persidangan



Contoh penggunaan Case Tracking dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Bupati Deiyai Tahun 2018

Penggunaan NUPP (NOMOR URUT PENGAJUAN PERKARA)

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di bagian registrasi perkara di Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal pada tahun 2018 telah menggunakan antrian yang berbasis sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bernama NUPP. Sistem tersebut dibangun dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para Pemohon, Termohon, Pihak Terkait di Mahkamah Konstitusi. Dengan sistem ini

diharapkan pelayanan kepada Para Pihak yang berperkara Mahkamah Konstitusi mendapatkan pelayanan yang optimal.



Tampilan User Interface di Mesin NUPP

Selain itu, dengan adanya sistem antrian ini dapat juga menjadi alat bantu mempercepat melakukan verifikasi berkas dan data Para Pihak. Verifikasi berkas dan data tersebut penting dilakukan dalam hal mengamankan data Para Pihak yang digunakan oleh MK sebagai bukti valid dari Para Pihak sebelum mendapat nomor antrian. Bukti valid yang selanjutnya disebut dengan Nomor Urut Pengajuan Permohonan dapat menjadi bukti dalam persidangan bahwa Para Pihak masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan.

Dasar dari pendirian sistem antrian ini adalah berdasarkan pengalaman Mahkamah Konstitusi yang telah beberapa kali menangani penyelesaian perselisihan hasil pilkada seringkali terkendala dengan adanya penumpukan antrian.

3. PENUTUP

Pelaksanaan program-program Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sampai saat ini masih terus dilakukan dan disempurnakan setiap tahun sesuai dengan rencana aksi reformasi birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Mahkamah Konstitusi 2015-2019. Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam sebuah lembaga peradilan yang independen, imparial dan adil.

Secara umum, laporan ini dibuat dalam rangka memberikan gambaran rincian perkembangan upaya Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK yang dilaksanakan selama tahun 2018 kepada para *Stakeholders*. Selain itu, laporan ini dibuat sebagai sarana sosialisasi program Reformasi Birokrasi bagi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat No, 6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000, Fax. (62-21) 3520177
Po Box 999 JKT 10000
email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id